

Upaya Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Solok Dalam Pemulihan Perekonomian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Yang Terdampak Pandemi Covid-19

Suci Rahmat Rahayu¹, Afriva Khaidir²

¹²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

Article Info	Abstrak
<p>Article history: Received 23 Augst 2021 Publish 03 November 2021</p>	<p>The purpose of this research is the efforts of the industry and trade cooperative service (Koperindag) of Solok Regency in the economic recovery of micro , small, and medium enterprises (MSMEs) affected by the covid-19 pandemic in order to create MSMEs that are able to survive and become economic drivers, especially after the economic crisis. Therefore, the support of all parties related to government policies is needed. This research is a descriptive analysis using a qualitative approach that uses primary data and secondary data. The informants in this study were determined by the purposive sampling method, where the selection of informants was based on certain characteristics. Data collection techniques in the form of field research by interviewing, observing and studying documentation with valid and accurate sources. The technique tests the validity of the data by triangulation of methods and source triangulation. While this data analysis technique uses analysis through the stages of data deception, data analysis, data reduction and, drawing conclusions. The results of this study indicate that: First, the efforts made consist of indicators, namely; (1) Creating job opportunities; (2) Reduce unemployment; (3) Reduce poverty; and (4) provide products. Second, internal factors that are owned consist of indicators, namely; (1) Lack of business capital; (2) Limited human resources; (3) Weak network and market penetration capabilities. Third, the external factors that are owned consist of indicators, namely; (1) The business climate is not yet fully condusive, (2) Limited facilities and infrastructure; (3) The impact of regional autonomy; (4) The impact of free markets; (5) Limited market access; (6) Financial limitations.</p>
<p>Keywords: <i>Effort, Koperindag, UMKM, Covid-19</i></p>	
	<p>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</p>
<p>Corresponding Author: Suci Rahmat Rahayu Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang Email: sucirahmatrahayu0@gmail.com</p>	

1. PENDAHULUAN

Covid-19 saat ini berdampak terhadap semua sektor, terutama terhadap suatu perekonomian internal negara dan keberadaan usaha kecil, menengah dan mikro. Pada masa pandemi, sebanyak 37.000 UMKM sudah mengungkapkan bahwa terdapatnya suatu pengaruh akibat pandemi. Adapun untuk 56% melaporkan adanya suatu penurunan penjualan serta sebanyak 22% melaporkan adanya pembiayaan yang bermasalah. Hal ini sebanyak 15% telah melaporkan masalah di dalam distribusi serta 4% melaporkan adanya kesulitan di dalam mendapatkan suatu bahan baku. Masalah ini sering terjadi apabila dihubungkan dengan suatu kebijakan yakni kebijakan PSBB. Untuk PSBB sendiri dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan covid-19. PSBB mencakup

pembatasan aktivitas tertentu warga di wilayah yang diduga terinfeksi covid-19. Di suatu provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pergerakan barang untuk mencegah penyebaran covid-19

Menurut Husna Ni'matul Husna (84:2020), potensi masalah yang perlu dipertimbangkan pemerintah daerah akibat covid-19 antara lain: anggaran untuk APBD yang terbatas untuk menangani covid-19, kemudian sarana dan prasarana dalam penanganan covid-19 tidak ada, kemudian persiapan medis yang tidak memadai untuk menangani covid-19, kemudian kurangnya tenaga medis untuk menangani covid-19 karena kepanikan pasokan bahan makanan dan kebutuhan pokok terganggu kemudian untuk pekerja harian dari entitas ekonomi yang mendasarinya (restoran, pedagang kaki lima, ojek). Hal ini menyebabkan mereka tidak bisa bekerja dan karenanya tidak memiliki penghasilan. Sehingga kemungkinan adanya PHK di industri tertutup. Hal ini akibat dampak kebijakan "work from home. Kemudian potensi pendapatan APBD dari pendapatan asli daerah (khususnya pajak dan pajak) belum maksimal serta penyerapan APBD belum maksimal.

Berdasarkan hasil survei (Noer Soetjipto,7: 2020) terdapat 96% pelaku usaha yang terdampak Covid-19 terhadap suatu bisnisnya, (hingga 1.785 koperasi dan 163.713 usaha kecil, menengah dan mikro). Dari jumlah tersebut, sebanyak 75% orang mengalami penurunan penjualan yang secara signifikan. Selain dari itu sebanyak 51% pelaku usaha meyakini bisnisnya kemungkinan hanya dapat bertahan dalam waktu 1 bulan sampai tiga 3 ke depan. Kemudian sebanyak 67% pelaku usaha tidak yakin untuk mendapatkan dana darurat serta sebanyak 75% percaya bahwa mereka tidak paham bagaimana merumuskan kebijakan selama pandemi. Pada saat yang sama, hanya 13% pengusaha yang percaya bahwa mereka memiliki suatu rencana manajemen krisis serta menemukan suatu solusi dalam mempertahankan bisnis.

Upaya preventif yang dilakukan pemerintah antara lain optimalisasi sumber daya yang ada, antara lain penggunaan pembiayaan APBD, sarana dan prasarana khususnya DAK Kesehatan serta dana desa 2020, untuk penanganan wabah covid-19 serta optimalisasi potensi lokal sebagai pertemuan dengan mereka. masyarakat. Kebutuhan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok. rakyat. Menurut Danny (Hermansah, 2020), UKM harus mengadopsi tiga strategi untuk menghadapi situasi krisis ini, di antaranya: pertama, meningkatkan kualitas produk dan layanan kedua, memanfaatkan sepenuhnya teknologi ketiga, untuk pengembangan bisnis lebih lanjut mempersiapkan diri. (www.alinea.id).

Namun fakta menunjukkan bahwa hal tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, karena wabah tersebut cukup menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya pemerintah kabupaten Solok provinsi Sumatera Barat. Kebijakan pemerintah mengimbau masyarakat untuk menjaga jarak sosial dan isolasi mandiri di rumah. Hal ini juga menurunkan tingkat jual beli masyarakat, yang juga mengancam perekonomian masyarakat, termasuk usaha kecil, menengah dan mikro yang ada.

Kabupaten Solok mengalami resesi ekonomi hingga 142 usaha kecil, menengah dan mikro karena sebagian besar usaha kecil, menengah dan mikro tidak dapat berproduksi dan tidak mendapat pesanan dari masyarakat. Selama wabah, selama pemerintah daerah memutuskan kebijakan dan aturan, masyarakat Kabupaten Solok tinggal di rumah, sehingga perekonomian masyarakat sangat buruk, terutama usaha kecil, menengah dan mikro Kabupaten Solok. Situasi ini membutuhkan berbagai upaya pemasaran dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Tujuan pemilihan pekerjaan ini adalah untuk mampu untuk meningkatkan suatu keunggulan bersaing sehingga usaha kecil, menengah dan mikro dapat bertahan dalam kondisi tertentu. UMKM menjadi suatu peranan sangat penting untuk pertumbuhan suatu perekonomian nasional.

Menurut data berita yang penulis peroleh di (www.jayantaranews.com) pada Jumat, 16 Oktober 2020, Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Solok (Koperindag) telah memberikan pelatihan pengembangan usaha kecil, menengah dan mikro (MIPYMES). kepada 40 Pengusaha MIPYMES, perusahaan peserta Kabupaten Solok untuk meningkatkan perekonomian di masa pandemi Covid-19. Menurut Eva Nasri, pelatihan UMKM di Kabupaten Solok akan mendapatkan orientasi UMKM yang berdaya saing serta inovatif, kemudian bantuan

tim kerja serta promosi suatu permodalan. Kemudian, berupa suatu alat untuk produksi, kemudian untuk pemasaran dilakukan melalui usaha kecil menengah online Kabupaten Solok.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2020 dengan Ibu Suriati sebagai Kasi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan UKM di Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Solok, mengatakan bahwa pada masa pandemi ini pemerintah Koperindag Kabupaten Solok telah melakukan pemulihan perekonomian dengan adanya pelatihan terhadap UMKM pada tanggal 28-30 Oktober 2020 di Hotel Emercia Batu Sangkar dengan pembahasan mengenai tentang Manajemen Keuangan bagi Pelaku UMKM pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, selain itu mengenai pemberian keterangan atau label suatu produk, cara pengemasan produk sehingga memiliki nilai jual tinggi saat dipasarkan, kegiatan pelatihan ini diselenggarakan sesuai dengan program dan anggaran dari Pemerintahan Pusat. Selama Covid 19 ini, dari Dinas Koperindag baru sekali ini melakukan pelatihan setiap UMKM, sebelum Covid pelatihan diadakan mulai 3-5 kali dilakukan pada UMKM, hal ini dikarenakan adanya larangan untuk berkumpul dan adanya keterbatasan anggaran. Pelatihan tersebut mendapatkan fasilitas seperti penginapan, makanan dan snack selama kegiatan dan uang saku tambahan Rp. 300.000,-/UMKM.. pelaku UMKM juga difasilitasi buku panduan seperti Dasar Buku Pembukuan Akuntansi dan Ecommerce. Sekitar 463 UMKM Dinas Koperindag melaporkan data yang diajukan pada Pemerintahan Pusat Maret 2020 yang lalu dan saat ini sekitar 9.400an UMKM, jadi pemerintah pusat yang menindaklanjuti bantuan tersebut. Bantuan diperoleh UMKM adalah dana BPUM yang telah diberikan pada Juli yang lalu.

Sesuai dengan hasil data yang diperoleh penulis tentang pendataan UMKM yang terdampak Covid-19 ini, ada beberapa kendala usaha potensi yang terdampak Covid-19 diantaranya yaitu; a) kurangnya daya beli masyarakat; b) bahan baku mahal dan permintaan pasar tidak tersedia; c) proses produksi dan pemasaran terganggu; d) menurunnya penjualan selama Covid-19; dan e) omset sangat menurun selama Covid-19. Hal tersebut, berdampak pada perekonomian masyarakat dengan berbagai bidang sektor usaha, diantaranya yaitu usaha kuliner, usaha fashion, usaha kerajinan, usaha batik dan jasa.

Usaha kecil, menengah dan mikro UMKM mempunyai suatu peran strategis penting untuk suatu perekonomian nasional. Situasi ini sangat mungkin terjadi karena keberadaan usaha kecil, menengah dan mikro mendominasi perekonomian Indonesia khususnya di Kabupaten Solok. Oleh karena itu, menjadi penting bahwa strategi pemerintah adalah membawa pemulihan ekonomi kepada masyarakat melalui upaya dan langkah-langkah yang harus diambil.

Berdasarkan suatu latar belakang diatas maka, untuk rumusan suatu masalah dalam riset :

1. Bagaimana Upaya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Solok dalam pemulihan perekonomian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemik COVID-19?
2. Apa saja Faktor Penghambat Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Solok dalam pemulihan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemik COVID-19?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Menurut Goggin dkk dalam Erwan, Agus dan Dyah, Ratih. S (2015: 89), kebijakan ini seharusnya menjadi pesan dari suatu pemerintah pusat terhadap suatu pemerintah daerah. Sedangkan Carl J Federick yang dikutip Leo Agustino (2008:7) Mengatakan bahwa kebijakan merupakan sebagai suatu serangkaian kegiatan diajukan oleh individu, kelompok ataupun pemerintah yang ada dalam suatu lingkungan tertentu. Sementara konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat sebab lebih menitikberatkan terhadap apa yang sebenarnya sedang dilaksanakan, bukan terhadap apa yang diajukan.

Konsep Ekonomi Publik

Ekonomi publik ialah ilmu ekonomi yang mempelajari serta menganalisis peran pemerintah dalam suatu kehidupan ekonomi masyarakat. Ekonomi publik memiliki suatu sejarah panjang sebagai suatu disiplin ekonomi. Ekonomi publik dapat diartikan sebagai karya sipil, pekerjaan publik, banyak hal personel, tema tumbuk laka dan ekonomi untuk mempertimbangkan situasi negara AAA. Ekonomi publik abad XX adalah Priyarsum yang terkenal yakni Richard A. Musgrave menegaskan bahwa pemerintah memiliki tiga peran, yaitu stabilitas, alokasi dan distribusi dalam perekonomian.

Peran pertama, yakni pemerintah dapat memastikan suatu perekonomian berada pada kesempatan kerja penuh serta dengan harga tetap stabil. Peran kedua terkait dengan suatu upaya pemerintah untuk mengalokasikan suatu sumber daya untuk perekonomian. Hal ini pemerintah dapat untuk memainkan suatu peran secara langsung ataupun tidak langsung, yakni lewat pajak serta subsidi. Hal ini bertujuan mendorong suatu kegiatan tertentu serta dapat menghambat suatu kegiatan lainnya. Untuk peran ketiga mengacu pada upaya pemerintah untuk mendistribusikan suatu produk yang dihasilkan.

Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam (Nurul Fauziah:2017) merupakan Usaha Kecil, yang didalamnya terdapat Usaha Mikro. UM ialah badan usaha yang kekayaan bersihnya paling banyak Rp. 200.000.000. Hal ini tidak termasuk tanah serta bangunan tempat komersial. Sementara penjualan tahunan maksimum Rp 1.000.000.000

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha mikro ialah perusahaan produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000. kekayaan ini tidak termasuk tanah dan bangunan atau penjualan tahunan sampai dengan Rp. 300.000.000.

Konsep Covid-19

Menurut Alex Sarmigi (3:2020) Covid-19 ialah anggota famili coronavirus, yang menyebabkan suatu penyakit menular serta mematikan, penyakit ini dapat menyerang mamalia, seperti saluran pernafasan hingga paru-paru manusia. Secara umum, orang yang terinfeksi Covid-19 akan mengalami gejala awal seperti demam, kemudian sakit, kemudian tenggorokan, kemudian pilek, bahkan batuk yang bisa berujung pada pneumonia.

Covid-19 atau yang dikenal dengan coronavirus ialah virus yang menyerang suatu sistem pernapasan. Ini ialah jenis virus baru yang telah menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti bayi, kemudian anak-anak, kemudian orang dewasa ataupun orang tua. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat dan menyebar ke beberapa wilayah lain di China, termasuk Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan suatu metode kualitatif dengan menggunakan data primer serta data sekunder. Untuk Informan dalam riset ini ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Untuk pemilihan informan didasarkan pada suatu karakteristik tertentu.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, kemudian observasi serta suatu dokumentasi dari suatu sumber yang valid dan benar. Sementara untuk lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Solok.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Solok dalam pemulihan perekonomian Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemik Covid-19

Upaya dinas koperindag dalam Kabupaten Solok dalam pemulihan perekonomian UMKM yang terdampak covid-19. Dalam melihat upaya yang dilakukan Koperindag sesuai

dengan teori Musran Munizu (2013:11) terdapat beberapa indikator yaitu menciptakan suatu lapangan kerja, kemudian mengurangi suatu pengangguran, kemudian memasarkan produk UMKM. UMKM ialah sebagai salah satu komponen industri nasional, sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian nasional, kemudian penyerapan suatu tenaga kerja, dan pemerataan suatu hasil pembangunan serta pengentasan suatu kemiskinan.

1) Menciptakan Lapangan Kerja

Pemerintah belum memberikan jaminan kesempatan kerja yang terbuka serta luas. Suatu perekonomian yang tidak menentu, dapat memberikan suatu peluang bagi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja di suatu sektor informal. Adapun untuk strategi dalam penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja ialah dengan strategi pembangunan yang ditujukan untuk menciptakan kesempatan kerja yang produktif dan ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia sebab jumlah penduduk yang besar.

Dalam undang-undang penciptaan lapangan kerja perlu ditegaskan peran Pemerintah Kabupaten Solok dalam mendukung suatu kebijakan nasional. Kebijakan yang akan dirumuskan meliputi model pembangunan yang dapat menciptakan lapangan kerja tanpa diskriminasi. Menyederhanakan birokrasi perizinan dan pelayanan publik, menyederhanakan retribusi, mengembangkan produk yang berkualitas, serta memperkuat kerjasama, kontak serta integrasi antar pusat dan daerah.

2) Mengurangi Pengangguran

Pada akhirnya, tingginya angka pengangguran hanya akan menjadi beban suatu perekonomian nasional. Meskipun pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan, kenyataan menunjukkan bahwa situasi ekonomi nasional akan mempengaruhi peningkatan pengangguran. Pengangguran ialah suatu masalah nasional yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, menjadi tanggung jawab suatu pemerintah serta memerlukan suatu perhatian khusus.

Terlepas dari semua upaya yang dilaksanakan, tetapi tingkat pengangguran tetap meningkat. Untuk itu perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang akan mempengaruhi suatu kondisi dan permintaan pasar serta tenaga kerja.

3) Memasarkan Produk

Produk ialah segala hal yang disediakan pasar dalam memuaskan suatu kebutuhan. Produk yang dijual terdiri dari barang fisik, kemudian jasa, kemudian pengalaman, kemudian orang, kemudian lokasi, dan organisasi, serta ide. Keterbatasan pemasaran produk adalah sebagian, besar pengusaha industri kecil mengutamakan aspek produksi. Sedangkan untuk fungsi pemasaran tidak dapat mengaksesnya, terutama dalam aspek informasi pasar serta jaringan pasar. Sehingga hanya sebagian besar yang berperan sebagai pengrajin. Dampak tidak langsung antara lain terhentinya suatu proses produksi, kemudian hilangnya produksi serta sumber pendapatan ekonomi, kemudian nilai kerugian ini tergolong nilai *flow value*.

Di masa pandemi covid-19, banyak UMKM yang menghentikan proses produksi usahanya karena penjualan yang menurun. Untuk menyediakan suatu produk menambahkan link pemasaran produk UMKM yaitu dengan bekerjasama dengan aplikasi Bukalapak. Ini bertujuan untuk pemasaran produk UMKM di luar daerah.

2. Apa saja Faktor Penghambat Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Solok dalam pemulihan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemik COVID-19

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan di atas bahwa Pemerintah Kabupaten Solok terdapat beberapa kendala dalam melakukan upaya pemulihan perekonomian yang ditimbulkan dari dampak covid-19.

a) Kurangnya Modal Usaha

Masalah pendanaan sebenarnya menjadi momok besar bagi usaha kecil, menengah dan mikro untuk mengembangkan usahanya. Hal ini terjadi karena pada umumnya perusahaan mikro kecil dan menengah adalah perusahaan swasta tertutup, yang mengandalkan modal komersial pemilikinya, yang jumlahnya sangat terbatas. Pada saat yang sama, modal komersial pihak lain juga sulit diperoleh, karena manajemen dan persyaratan teknis bank sulit dipenuhi untuk usaha kecil, menengah dan mikro.

Menurut penelitian Lestari (2007), dalam memenuhi suatu kebutuhan masalah permodalan, usaha kecil dan menengah menghadapi empat masalah yakni: a) Usaha mikro masih memiliki akses yang rendah atau rendah terhadap berbagai informasi, kemudian layanan, dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal. Pembatasan, misalnya, bank dan non-bank, serta badan usaha milik negara dan perusahaan. b) Prosedur dan persyaratan bank terlalu rumit, serta jumlah dan waktu pinjaman yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan. Sebagian besar bank masih menganggap hipotek fisik sebagai salah satu persyaratan serta cenderung mengesampingkan kelayakan komersial. c) Suku bunga yang dikenakan masih sangat tinggi. d) kurangnya bimbingan terutama untuk pengelolaan keuangan, misalnya perencanaan keuangan, penyusunan proposal, dll.

b) Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil, menengah dan mikro adalah bisnis keluarga yang diwariskan dan dikembangkan secara tradisional. Keterbatasan sumber daya manusia pendidikan formal serta pengetahuan serta keterampilan sangat mempengaruhi kemampuan suatu UMKM untuk mengembangkan usahanya. Masalah ini akan mempengaruhi penyesuaian untuk perkembangan teknologi usaha kecil, menengah dan mikro dalam meningkatkan suatu daya saing produknya.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi salah satu kendala untuk usaha mikro, terutama di bidang kewirausahaan, kemudian manajemen, kemudian teknik suatu produksi, kemudian pengembangan suatu produk, desain teknik, kontrol kualitas, organisasi suatu perusahaan, kemudian akuntansi, pengolahan data, pemasaran teknis, dan riset pasar. Pembatasan ini menghambat persaingan usaha mikro Indonesia di pasar domestik dan internasional. Pemerintah daerah membantu untuk pengembangan SDM usaha mikro, ialah pemerintah daerah memberikan pendidikan serta pelatihan untuk SDM usaha mikro. Tujuannya untuk meningkatkan suatu pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian sikap dan perilaku SDM untuk usaha mikro.

c) Lemahnya Jaringan dan Kemampuan Pasar

UMKM ialah usaha suatu keluarga dengan jaringan suatu usaha terbatas serta kemampuan penetrasi pasar yang rendah, disebabkan jumlah suatu produk yang dihasilkan sangat terbatas dan daya saing mutu yang rendah. Berbeda dengan perusahaan yang sudah memiliki jaringan kuat dan matang serta didukung oleh teknologi mampu memasuki pasar internasional. (Ishak, 2005) mengatakan adalah minimnya akses informasi serta yang terkhusus untuk informasi pasar. Karena keterbatasan akses terhadap informasi pasar, mengakibatkan rendahnya posisi pasar dan lemahnya daya saing global. Sehingga menjadi suatu kendala dalam memasarkan produknya. Minimnya informasi pasar membuat usaha kecil, menengah, dan mikro tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas serta tepat sasaran. sehingga ini pula yang menyebabkan perkembangannya mengalami stagnasi.

d) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Akses informasi terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi terbatas, sehingga mengakibatkan sarana dan prasarana tidak dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan usaha yang diharapkan. Keterbelakangan teknologi ini, tidak hanya menyebabkan rendahnya produktivitas serta efisiensi faktor total dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk. Keterbatasan teknologi, terutama keterbatasan

usaha keluarga (mikro), disebabkan oleh banyak faktor, antara lain keterbatasan dana investasi untuk pembelian mesin baru atau perbaikan proses produksi, kemudian keterbatasan informasi perkembangan teknologi atau mesin serta alat produksi baru, kemudian Sumber daya manusia untuk mengoperasikan mesin baru terbatas.

e) Dampak Pasar Bebas

Globalisasi serta pasar bebas telah memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi industri kecil dan menengah Indonesia, terutama usaha kecil, menengah dan mikro. Masuknya produk China dengan harga yang relatif rendah telah melemahkan posisi usaha kecil, menengah dan mikro di pasar lokal dan nasional.

Globalisasi serta pasar bebas telah memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap industri kecil dan menengah Indonesia, terutama usaha kecil, menengah dan mikro. Masuknya produk Cina, menyebabkan rendahnya suatu harga. Sehingga melemahkan posisi usaha kecil, menengah dan mikro di pasar lokal dan nasional.

Strategi dalam mengantisipasi suatu mekanisme pasar yang semakin terbuka serta kompetitif khususnya untuk kawasan asean ialah penguasaan pasar yang menjadi prasyarat bagi peningkatan daya saing usaha kecil, menengah dan mikro. Untuk menguasai pasar tersebut, usaha kecil, menengah dan mikro perlu memperoleh informasi tentang pasar produksi dan pasar serta faktor-faktor produksi secara mudah dan cepat guna memperluas jaringan suatu pemasaran produk yang dihasilkan oleh usaha menengah, kecil dan mikro.

f) Keterbatasan Anggaran

Usaha mikro, terutama di Indonesia, menghadapi 2 masalah keuangan utama yaitu memobilisasi dana awal dan memperoleh modal kerja, seperti membiayai investasi jangka panjang untuk pertumbuhan produksi jangka panjang. Alasan pembatasan ini adalah karena banyak pengusaha yang tinggal di daerah yang relatif terpencil, lokasi bank terlalu jauh, persyaratan terlalu berat, kemudian urusan administrasi terlalu panjang, dan kurangnya rencana kredit yang ada dan relevan. Prosedur.

Dampak langsung meliputi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kerusakan sektor ekonomi, seperti kerusakan bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, dan kerugian ekonomi infrastruktur lahan pertanian (seperti kerusakan bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, infrastruktur, dan fasilitas pertanian).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil investigasi dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Upaya Koperindag Bupati Solok dalam upaya pemulihan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (dampak pandemi COVID-19) UMKM) belum terimplementasi dengan baik. Penciptaan lapangan kerja berarti pemerintah telah memberikan pelatihan kewirausahaan bagi 79 usaha kecil, menengah dan mikro. Kegiatan ini mendapatkan pembinaan yang kompetitif dan inovatif/kreatif, bantuan peralatan kerja, dan dana promosi, seperti menerima peralatan masak. Dari sisi pemerintah, angka pengangguran berkurang, dan pendataan telah dilakukan pemilihan 2 pelaku usaha terbaik, dan direkomendasikan untuk mendapatkan kemudahan memperoleh sertifikat halal dari MUI di Sumbar. Karena keterbatasan keuangan daerah selama Covid-19, kegiatan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah belum mencapai kondisi terbaik. Mengkomersialisasikan produk pelaku usaha kecil, menengah dan mikro. Hal ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan aplikasi Bukalapak. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat promosi produk usaha kecil, menengah dan mikro serta memperkenalkan produk usaha kecil, menengah dan mikro di luar daerah.

Sementara untuk faktor yang mempengaruhi Koperindag Kabupaten Solok dalam pemulihan perekonomian UMKM yang terdampak pandemik covid-19 mengalami berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah; (a). Kurangnya modal usaha, dapat dilihat dari bantuan dari Pemerintah mengembangkan UMKM dibidang perikanan dan pangan. Serta adanya anggaran BPUM yang terdampak Covid-19 sekitar RP. 2.400.000.-/orang. (b) SDM

yang terbatas. Kemampuan SDM yang dimiliki belum maksimal, ini disebabkan keterbatasan jumlah pegawai yang masih sedikit. (c). Lemahnya jaringan dan kemampuan pasar dinilai masih lemah, karena kesulitan menghadapi masuknya produk yang harganya murah. (d) Keterbatasan sarana dan prasarana, karena adanya keterbatasan suatu akses jalan, kemudian keterbatasan suatu lahan serta keterbatasan SDM. (e). Dampak pasar bebas, dilihat dari adanya perlindungan pasar yang dilakukan pemerintah ada, seperti pencegahan terjadinya penguasaan pasar. (F) Keterbatasan anggaran, sehingga berdampak langsung pada ekonomi, misalnya rusaknya bangunan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Djatmiko. 2020. Hambatan Dan Tantangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 8, Nomor 3, September 2020.* (<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.)
- Ardiana, I.A, I.D.K.R dan Brahmayanti, Subaedi. 2010. Kompetensi SDM UKM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya. *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN, VOL.12, NO. 1, MARET 2010: 42-55.*
- Aknolt, Kristian Pakpahan. 2020. Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Amaliya, Shofiana. 2020. Implementasi Program Afiliasi Berbasis *Virtual Team* dalam UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Pada Masa Pandemi Covid-19. (<http://ssm/abstract=590822>.)
- Beni, Dwi Komara, Heri Cahyo Bagus Setiawan, dan Aries Kurniawan. 2020. Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global. *Jurnal Manajemen Bisnis, Volume 17, Nomor 3, Juli 2020.*
- Deddy, Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Elex, Sarmigi. 2020. Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Al-Dzahab, Volume 1 Nomor 1 tahun 2020.*
- Erwan Agus Putwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia). Yogyakarta: Gava Media.
- Heri, Kurniawansyah HS, dan dkk. 2020. Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Volume 1, Nomor 2, 2020:130-139.*
- Husna, Ni'matul Ulya. 2020. Alternatif Strategi Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19 Pemerintah Daerah Jawa Timur Pada Kawasan Agropolitan. *Journal of Islamic Economic and Business, Volume 3, Nomor 1, 2020, 80-109.*
- Iman, Safi'i, Silvi Rushanti Widodo, dan Ria Lestari Pangastuti. 2020. Analisis Risiko Pada UKM Tahu Takwa Kediri Terhadap Dampak Covid-19. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri, Volume 9, Nomor 2-Juli 2020.* (<http://doi.org/10.2659/jrsi.v9i2.4003.107-114>.)
- Kuswanto, dan Imam, Alfi. 2020. Strategi Keuangan UMKM Cilacap Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus UMKM Kabupaten Cilacap). *Jurnal Teknologi dan Bisnis Vol. 2, No.1, Page: 40 – 51, Year 2020.*
- Noer, Soetjipto. 2020. Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19. Surabaya: K-Media